

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak pemberlakuan otonomi daerah secara nasional dan efektif, terdapat banyak perubahan yang bersifat fundamental dalam pemerintahan. Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan pengelolaan daerah secara mandiri tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengalokasian dana dengan efektif dan efisien guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik (Dewi *et al.*, 2015).

Hak otonomi daerah ini akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah akan berusaha dalam pengolahan dan peningkatan sumber pendapatannya guna mensejahterakan masyarakat serta memajukan daerahnya. Pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang baik akan membuka peluang terjadinya peluang korupsi yang dapat merugikan pemerintah daerah sehingga menurunkan kinerjanya. Untuk itu, diperlukan adanya transparansi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumberdaya daerah (Suryani, 2021).

Akuntansi sektor publik sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik semakin menjadi sorotan masyarakat akibat adanya kebocoran serta pemborosan dana, selalu mengalami kerugian, dan kurangnya efisiensi anggaran (Liando *et al.*, 2014). Kinerja sektor publik memang dinilai buruk oleh masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena beberapa negara berkembang seperti Malaysia, Thailand dan Taiwan memiliki pemerintahan dengan kinerja yang baik dimana pelayanan publik serta perusahaan publik dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada pembangunan nasional serta stabilitas publik (Sari, 2014; Batubara dan Risna, 2020).

Harapan akan kinerja yang baik tidak lepas dari pengawasan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik sampai saat sekarang ini masih dinilai sebagai sumber pemborosan, kebocoran dana serta sebagai sebuah institusi yang selalu mengalami kerugian (Sari, 2020).

Dengan harapan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan oleh masyarakat, maka dikenallah suatu konsep yang disebut dengan *value for money*. Konsep ini terdiri atas tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ketiga elemen ini mengindikasikan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan berikut dengan sumber dan pengeluarannya. Peningkatan tuntutan masyarakat atas *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan membuat pemerintah melakukan penerapan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran dalam pemerintahan.

Perwujudan pemerintahan dengan kinerja yang baik semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Adanya kemajuan teknologi yang sangat signifikan di bidang pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitasnya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diterapkan dalam suatu istilah yang disebut pemerintahan elektronik atau *e-government*. *E-government* ini merupakan sistem pemerintahan dimana teknologi informasi dapat mengubah hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, swasta, serta pemerintah lainnya (Bank, 2012). Konsep ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan (Grondlun, 2010). Selain itu, *e-government* juga memiliki potensi untuk melakukan efisiensi, mengurangi korupsi, meningkatkan pertumbuhan laba dan transparansi, kenyamanan serta efisiensi biaya dalam pemerintahan di negara maju maupun di negara berkembang (Baguma dan Lubega, 2013). Alhasil, akses informasi dan layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Masyarakat dapat menjadi lebih produktif karena berkurangnya masa antrian dalam penyelesaian suatu urusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pelayanan publik juga dapat dilakukan selama 24 jam tanpa menggunakan kertas sehingga lebih ekonomis.

Keinginan dan kepuasan masyarakat akan kebijakan pemerintah juga akan lebih mudah terpenuhi melalui penerapan sistem *e-government*. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan lebih maksimal karena adanya teknologi seperti website dan aplikasi sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi atau informasi yang tidak simetris antara pemerintah dengan masyarakat.

Sampai saat ini, *E-governement* sudah diterapkan di 193 negara, termasuk Indonesia. Penerapan *E-governement* di Indonesia dimulai pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 juga menjadi penanda awal bagi pemerintahan dalam menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Mulai dari pemerintah pusat sendiri, gubernur, bupati dan walikota sampai kepala daerah lainnya secara nasional diinstruksikan untuk mengimplementasikan *e-governement* (Djunid *et al.*, 2020).

Merujuk pada Instruksi Presiden tersebut, pemerintah daerah mulai membuat website pemerintahan dan jumlahnya terus bertambah. Menurut (Bhagawati, 2020), website/situs web merupakan salah satu implementasi *e-governement* yang paling dominan. Hal ini dikarenakan informasi yang ada di dalam situs web lebih mudah diakses oleh pihak pengguna informasi kapanpun dan dimanapun.

Selain Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, terdapat beberapa peraturan lanjutan yang merincikan mengenai penggunaan situs web sebagai salah satu bentuk implementasi dari *e-governement* di pemerintahan. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 53, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 27, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 Pasal 4 dan Pasal 5. Peraturan ini menyatakan penggunaan media elektronik (website) untuk memberikan informasi kepada masyarakat (Puspita dan Martani, 2013).

Menurut Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003, *e-governement* harus memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *e-governement* yang lebih baik, penilaian maturitas *e-governement* dalam basis website juga menjadi penilaian yang tidak bisa dipisahkan dari evaluasi *e-governement* yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penilaian ini sangat penting karena website merupakan salah satu implementasi terbesar dari *e-governement*.

Model yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah model *United Nation* (Djunid *et al.*, 2020). Menurut penelitian

perbandingan model penilaian yang dilakukan oleh (Almutfah *et al.*, 2016),(Khalid dan Lavilles, 2019; Djunid *et al.*, 2020) menyatakan bahwa model United Nation ini merupakan model yang baik, dimana model ini berfokus kepada warga negara, partisipasi warga negara secara elektronik, serta lebih memusatkan perhatian kepada kebutuhan warga negara sehingga *e-government* dapat menjadi lebih transparan dan efektif. Selain itu, model ini juga menjadi model dengan aplikasi terluas dimana model ini digunakan PBB untuk memberikan pemeringkatan kepada 193 negara di dunia.

Selain tingkat maturitas *e-government*, transparansi juga merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Mardiasmo (2006) dalam (Auditya dan Husaini, 2013) mengatakan bahwa dalam melayani masyarakat, pemerintah daerah harus lebih cepat tanggap dan responsif. Terdapat tiga jenis mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif. Mekanisme tersebut yaitu membangun Kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat tersebut; memperbaiki pengendalian internal berikut dengan *internal rules*; dan melakukan pemberian layanan kepada masyarakat. Ketiga mekanisme ini nantinya juga akan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pemerintah daerah.

(Akbar, 2012) juga membenarkan bahwa dalam era reformasi sekarang ini, era reformasi memberikan dampak terhadap tuntutan akan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia sangat dibutuhkan. Transparansi merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip tata pemerintah yang baik atau *good governance* dalam pemerintah daerah. Hal ini akan berujung pada pemerintahan yang bertanggungjawab dan partisipatif.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan konsep transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik dan berpihak kepada masyarakat sebagai dampak dari peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Terdapat berbagai penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara transparansi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan pemerintah daerah suatu keharusan dalam melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah akan berusaha sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat (Rahmanurrasjid, 2008). Implementasi transparansi akan memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat terhadap pemerintahan sehingga jalannya pemerintahan akan sesuai dengan ketentuan yang ada dan pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.

Penelitian lain mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh (Wandari *et al.*, 2015), (Jitmau *et al.*, 2017), (Budiasni *et al.*, 2017), (Purnomo dan Putri, 2018), (Nababan *et al.*, 2018), (Umar *et al.*, 2018), dan (Laoli, 2019). Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi dengan kinerja pemerintah daerah yang menggunakan konsep *value for money*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan (Laoli, 2019) mengemukakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah berkonsep *value for money* ini.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan biasanya hanya berupa studi kasus pada satu daerah saja. Akan tetapi, belum ada dilakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat maturitas pemerintahan elektronik dalam basis web terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pada era web 2.0, penulis mencoba melakukan penelitian yang mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan situs web sebagai basis dan mencakup banyak pemerintah daerah.

Wilayah yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Pulau Sumatera. Hal ini dikarenakan di saat memakai *purposive sampling*, Pulau Sumatera memiliki pemda terbanyak yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu sebesar 35 pemerintah daerah dari 154 total pemerintah daerah dengan

persentase sebesar 22,7%, disusul pulau jawa 27 pemerintah daerah dari total 117 pemerintah daerah dengan persentase sebesar 22,6%, dan diikuti pulau-pulau lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh *e-government maturity* atau e-government dan transparansi pengelolaan keuangan berbasis web terhadap kinerja pemerintah daerah dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Maturitas Pemerintahan Elektronik Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Berbasis Website Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat maturitas *e-government* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana tingkat transparansi pengelolaan keuangan berbasis web pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh maturitas *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan berbasis web pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat maturitas pemerintahan elektronik pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan berbasis web pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat transparansi pengelolaan keuangan berbasis website terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan:

1. Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi maturitas website pemerintahan serta tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi masyarakat, dapat membantu masyarakat agar dapat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang modern dan transparan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam hal pemahaman tentang tulisan ini, sistematika penulisan terbagi atas 5 bab. Bab pertama yaitu Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, Tinjauan Pustaka akan membahas tentang teori yang berkaitan dengan identifikasi penelitian serta isi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, dan pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran. Bab III, Metode Penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, prosedur penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data. Bab IV merupakan Hasil dan Pembahasan yang akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang memuat hasil pengolahan data berdasarkan metodologi penelitian. Terakhir adalah Bab V yang menjelaskan tentang Kesimpulan, Batasan Penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.